

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi

1. Pengertian komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa Inggris *communication* dan berasal dari kata latin *commuunicatio*, serta bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini memiliki maksud sama makna.⁸ Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui sebuah media untuk mendapatkan umpan balik. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan perubahan terhadap sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, serta dapat memberikan perubahan sosial. Pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, KPU Kabupaten Kediri melakukan kegiatan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kediri.

2. Perencanaan komunikasi

Perencanaan dapat dimaknai sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sadar dan terus – menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁹ Perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu rencana operasional yang digunakan agar dapat mencapai tujuan. Sedangkan perencanaan komunikasi, pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rencana untuk menyampaikan pesan atau informasi agar dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan perencanaan, terdapat beberapa tipe perencanaan, yaitu perencanaan berdasarkan substantif, perencanaan berdasarkan tingkatannya,

⁸ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 9

⁹ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 28.

perencanaan berdasarkan ruang lingkup, perencanaan berdasarkan sistem desain, perencanaan berdasarkan lingkup teritorial, perencanaan berdasarkan jangka waktu, serta perencanaan alternatif.

Dalam menentukan perencanaan komunikasi, KPU Kabupaten Kediri tentunya menerapkan beberapa tipe – tipe perencanaan komunikasi tersebut. Misalnya dalam rencana mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kediri tahun 2020 kepada masyarakat atau pemilih, KPU Kabupaten Kediri menerapkan tipe perencanaan komunikasi berdasarkan lingkup teritorial, dengan membagi Kabupaten Kediri menjadi beberapa wilayah yang masing – masing wilayahnya dikelola oleh koordinator – koordinator wilayah (korwil) yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi antar wilayah. Menentukan perencanaan komunikasi merupakan suatu langkah awal sederhana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif.

3. Strategi komunikasi

Strategi menurut Steinberg dalam Pito merupakan rencana atau tindakan, dan penyusunan. Pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah strategi. Sedangkan menurut Pearce dan Robinson, strategi merupakan rancangan atau konsep berskala besar yang digunakan untuk menghadapi permasalahan atau hambatan di masa yang akan datang, agar tujuan suatu organisasi atau perusahaan dapat tercapai.¹⁰ Sedangkan komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan atau informasi oleh komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan (penerima

¹⁰ Junaidi, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Provinsi Nusa Tenggara Barat” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019), 43.

pesan) melalui media untuk memperoleh *feedback* atau umpan balik. Komunikasi juga memiliki fungsi, diantaranya sebagai media informasi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pendidikan, serta sebagai pembentuk opini publik.

Strategi komunikasi merupakan suatu cara yang dibuat dan memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui penerapan ide-ide baru. Strategi komunikasi menurut pakar perencanaan komunikasi Middleton adalah kolaborasi terbaik dari semua elemen-elemen komunikasi, mulai dari komunikator (penyampai pesan), pesan, saluran (media), komunikan (penerima pesan) sampai pada pengaruh (efek) dalam mencapai tujuan komunikasi yang efektif.¹¹ Pemilihan strategi merupakan langkah penting dan memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, karena pemilihan strategi sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Apabila strategi komunikasi yang dipilih kurang tepat, maka hasil yang diperoleh bisa berakibat fatal, seperti kerugian materi, waktu dan tenaga.¹²

4. Model perencanaan komunikasi berbasis KAP

Dalam menentukan perencanaan komunikasi, suatu lembaga atau organisasi tentu akan menggunakan model perencanaan komunikasi yang sesuai dengan cakupan tugas dan area bidang komunikasinya.¹³ Dalam kaitannya dengan strategi komunikasi KPU Kabupaten Kediri sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan satu pasangan calon di masa pandemi *Covid-19*, terdapat model perencanaan

¹¹ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 64.

¹² *Ibid.*, 65.

¹³ *Ibid.*, 70.

komunikasi yang dapat diterapkan untuk menentukan perencanaan komunikasi agar dapat menghasilkan strategi komunikasi oleh KPU Kabupaten Kediri.

Model perencanaan komunikasi berbasis *knowledge, attitude, dan practice* atau yang disingkat KAP. Dalam model perencanaan berbasis KAP ini terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan untuk menerapkan program komunikasinya. Tahap pertama mencakup target sasaran yaitu khalayaknya, kemudian pesan atau bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada khalayak, serta saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasinya. Tahap yang kedua mencakup perencanaan terhadap desain pesan dan produksi media yang relevan dengan target komunikasi atau dalam hal ini adalah pemilihan. Dalam model perencanaan komunikasi berbasis KAP ini juga menekankan perlunya dilakukan uji coba (*pre-testing*) terhadap materi informasi, penetapan anggaran, waktu sampai personil atau orang – orang yang akan melaksanakan program komunikasi yang telah dibentuk. Serta tahap yang ketiga yaitu adalah tahap monitoring, dimana setelah proses penyampaian pesan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, maupun perubahan perilaku dari komunikan atau target komunikasi, yang dalam hal ini merupakan pemilihan atau partisipan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.¹⁴

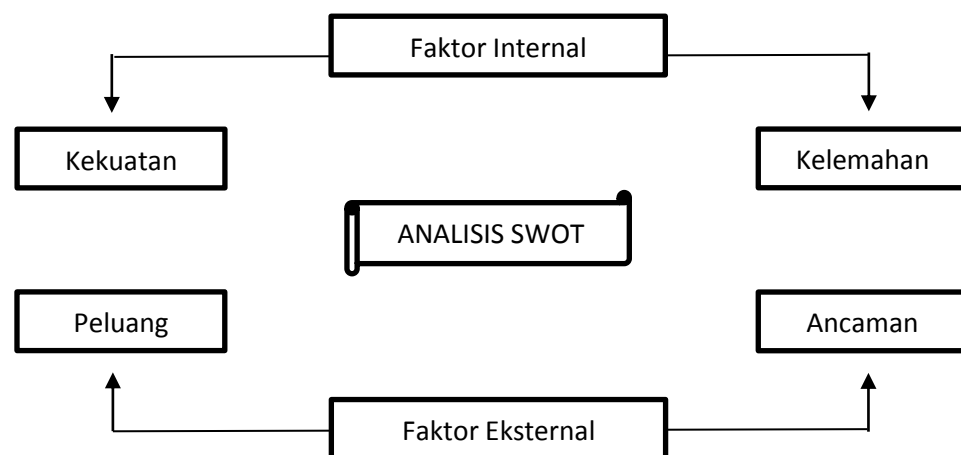
5. Analisis SWOT

Dalam menetapkan strategi untuk perencanaan komunikasi terdapat beberapa model analisis yang dapat digunakan, salah satunya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan model analisis untuk mengukur *Strengths*

¹⁴ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 90.

atau kekuatan – kekuatan yang dimiliki, *Weakness* atau kelemahan – kelemahan yang ada, *Opportunities* atau Peluang – peluang yang bisa diperoleh dan *Threats* atau ancaman – ancaman yang bisa ditemui.¹⁵

Dari keempat komponen analisis tersebut, dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam analisis ini adalah komponen kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), kedua komponen ini berkaitan erat dengan sumber daya dan manajemen dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah komponen peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), pada komponen - komponen ini banyak ditentukan oleh kemampuan organisasi atau suatu lembaga dalam berkomunikasi maupun dalam bekerja sama dengan pihak atau lembaga lain.¹⁶ Berikut bagan model analisis SWOT yang digunakan untuk menetapkan strategi dalam perencanaan komunikasi.



Gambar 2.1 Model Analisis SWOT

¹⁵ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 107.

¹⁶ *Ibid.*, 109.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian pemilihan umum

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan.¹⁷ Dalam pemilihan umum terdapat beberapa unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yaitu objek pemilu atau warga negara yang memilih pemimpinnya, yang kedua adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik, yang ketiga adalah sistem pemilihan yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.¹⁸

2. Pemilihan serentak

Penyelenggaraan pemilihan pertama diselenggarakan di Indonesia pada bulan Juni tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tahun 2020, merupakan tahun keempat penyelenggaraan pemilihan serentak di Indonesia. Pemilihan serentak yang dimaksud mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kota.

Pemilihan serentak tahun 2020 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 awalnya sempat mengalami

¹⁷ Muhammad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 46.

¹⁸ *Ibid.*, 57.

penundaan, kemudian dilanjutkan kembali sesuai dengan beberapa dasar hukum dan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 secara serentak di 270 daerah atau di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dapat bersifat aktif maupun pasif, serta dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.¹⁹ Partisipasi politik merupakan proses atau kegiatan keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

4. Bentuk partisipasi masyarakat

Dedi Irawan dalam Efriza menyebutkan beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik antara lain :

a. Pemungutan suara atau *voting*

Pemungutan suara atau *voting* merupakan salah satu bentuk partisipasi berupa pemberian suara oleh masyarakat secara individual kepada calon wakil rakyat baik dalam pemilihan eksekutif maupun pemilihan legislatif.²⁰

¹⁹ Junaidi, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Provinsi Nusa Tenggara Barat" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019), 30.

²⁰ Ibid., 32.

b. Kampanye politik

Kampanye politik merupakan kegiatan politik yang bersifat persuasif dengan tujuan mempengaruhi seseorang, kelompok atau organisasi lain agar mengikuti kegiatan politik dari pihak yang berkampanye.

c. Aktivitas grup

Aktivitas grup adalah kegiatan politik yang tersistematis dan digerakkan oleh sebuah kelompok tertentu. Misalnya kegiatan demonstrasi, diskusi politik, teror, dll.

d. Kontak politik

Kontak politik merupakan kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang kepada pemimpin partai politik atau elite politik, dll.

Secara konstitusional, partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik seperti pemberian suara pada saat Pemilu merupakan hak dari masing-masing individu. Tidak ada hukum konstitusi yang menyebutkan sanksi tertentu bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, apabila ditinjau dari pemberian undangan dari KPU untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan yang bersifat darurat untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah meskipun tidak ada sanksi secara konstitusional, sebagaimana keterangan berikut.

قَوْلُهُ (وَوَاجِبٌ نَصْبُ إِمَامٍ عَدِلٍ) أَي نَصْبِ إِمَامٍ عَدِلٍ وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ عِنْدَ
عَدَمِ النَّصِّ مِنَ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ وَعَدَمِ الْأَسْتِخْلَافِ مِنَ الْإِمَامِ السَّابِقِ ...
وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ نَصْبِ الْإِمَامِ بَيْنَ زَمَنِ الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ
أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ

Artinya : “(Wajib menegakkan pemerintah yang adil) maknanya, umat diwajibkan untuk menegakkan pemerintahan yang adil ketika tidak ada *nash* dari Allah atau rasul-Nya pada pribadi tertentu, dan tidak ada penunjukkan pengganti dari pemerintah sebelumnya... Tidak ada perbedaan soal kewajiban menegakkan pemerintahan di zaman kaos/fitnah atau situasi stabil-kondusif-normal sebagaimana pandangan Mazhab Ahlussunnah dan mayoritas ulama Muktazilah.”²¹

Secara jelas, Syekh M Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan di tengah masyarakat. Kewajiban ini bersifat syari, bukan aqli.²² Dalam agama Islam, dijelaskan melalui kita *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Imam al-Mawardi terkait memilih pemimpin. Kepemimpinan sendiri memiliki fungsi untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dengan demikian, memilih dan mengangkat seorang pemimpin untuk penduduk yang tinggal dalam satu negara, berdasarkan *ijma'* atau kesepakatan para ulama adalah wajib.²³

²¹ Alhafiz Kurniawan, “Bagaimana Sikap Golput dalam Pandangan Islam?” *NU* (online), <https://islam.nu.or.id/post/read/104904/bagaimana-sikap-golput-dalam-pandangan-islam>, 17 April 2019, diakses 01 Januari 2021.

²² Ibid.,

²³ Riswadi, “Dilema Kewajiban Memilih Pemimpin dan Menjaga Jiwa di Tengah Pandemi”, *NU* (online), <https://www.nu.or.id/post/read/124243/dilema-kewajiban-memilih-pemimpin-dan-menjaga-jiwa-di-tengah-pandemi>, 30 Oktober 2020, diakses 01 Januari 2021.

Rasulullah SAW bersabda : “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya”. (HR. Abud Dawud dan Abu Hurairah). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, telah dijelaskan pentingnya memilih pemimpin dimulai dari lingkup kecil termasuk juga pada lingkup yang paling besar. Kemudian, Rasulullah SAW juga bersabda : “Tidak halal atau tidak dibenarkan bagi tiga muslim yang berdiam di suatu tempat, kecuali apabila mereka mengangkat salah satu diantara mereka sebagai pemimpin”. (HR. Abu Daud).²⁴

²⁴ Riswadi, “Dilema Kewajiban Memilih Pemimpin dan Menjaga Jiwa di Tengah Pandemi”, *NU* (online), <https://www.nu.or.id/post/read/124243/dilema-kewajiban-memilih-pemimpin-dan-menjaga-jiwa-di-tengah-pandemi>, 30 Oktober 2020, diakses 01 Januari 2021.